

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 PROGRAM CEGAH *STUNTING* SEJAK DINI DI KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

*Imam Fachruddin*<sup>1)</sup>, *Suwarno*<sup>2)</sup>, *\*Estina Pravita Sari*<sup>3)</sup>

1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [estina.pravita@gmail.com](mailto:estina.pravita@gmail.com)

Submitted: 12-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024

**Kata Kunci:**  
Implementasi;  
Peraturan  
Bupati;  
*Stunting*.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Program Cegah *Stunting* Sejak Dini di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Program Cegah *Stunting* Sejak Dini di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang telah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada kendala pada beberapa hal sehingga belum optimal. Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 di Kecamatan Ngusikan antara lain terbatasnya jumlah bantuan dari pemerintah dan faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi asupan gizi untuk anak berisiko *stunting*. Solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain perlu adanya program bantuan langsung kepada keluarga berisiko *stunting* dalam bentuk program bantuan makanan, suplemen gizi, ataupun pendidikan gizi serta perlu adanya pembentukan kelompok dukungan sosial di masyarakat untuk saling berbagi sumber daya dan informasi tentang cara pemenuhan kebutuhan gizi dengan anggaran terbatas.

**Keywords:** :  
*Implementation;*  
*Regent*  
*Regulations;*  
*Stunting.*

**Abstract**

*The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Regent Regulation Number 4 of 2022 on the early stunting prevention program in Ngusikan District, Jombang Regency. This research also analyzes factors that support and hinder the implementation of Regent Regulation Number 4 of 2022 in Ngusikan District, Jombang Regency. This research uses a qualitative descriptive research approach. The results of the research show that the implementation of Regent's Regulation Number 4 of 2022, the early stunting prevention program in Ngusikan sub-district, Jombang district has gone quite well, but there are still obstacles in several areas so it is not optimal. Factors inhibiting the implementation of Regent Regulation Number 4 of 2022 in Ngusikan District include the limited amount of assistance from the government and economic factors of families who are unable to meet the nutritional intake for children at risk of stunting. Solutions that can be used to*

*overcome this problem are the need for direct assistance programs to families at risk of stunting in the form of food assistance programs, nutritional supplements, or nutritional education as well as the need for the formation of social support groups in the community to share resources and information about how to meet needs. nutrition on a limited budget.*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini struktur penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan dalam jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Situasi ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meraih *demographic dividend* (bonus demografi) (Sutikno, 2020). Indonesia Emas 2045 akan dapat terwujud jika bonus demografi di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi yakni adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Masalah terkait sumber daya manusia yang memerlukan penanganan segera saat ini adalah *stunting* (Archda & Tumangger, 2019), (Rahmawati et al., 2020), (Khosiah & Muhardini, 2019).

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Perpres No.72, 2021). *Stunting* merupakan salah satu persoalan terkait sumber daya manusia yang perlu mendapatkan intervensi segera. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap penanganan *stunting* dapat dilihat dari penetapan *stunting* sebagai salah satu fokus utama dalam rangka pembangunan nasional.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi. Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan prevalensi *stunting* nasional tahun 2024 turun menjadi 14%. Senada dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Jombang juga berkomitmen dalam rangka mendukung program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan hal tersebut Bupati menyusun suatu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Salah satu tujuan yang tertuang pada peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 yaitu membangun dan mengoptimalkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) terintegrasi di tingkat kecamatan. Tim percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan

melalui Keputusan Camat bertugas untuk mengoordinasikan intervensi penurunan *stunting* di tingkat kecamatan, dengan camat sebagai koordinator pelaksana.

Keluarga berisiko *stunting* adalah keluarga yang menghadapi satu atau lebih faktor risiko *stunting* mencakup calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0 hingga 23 bulan, serta anak usia 24 hingga 59 bulan yang berasal dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, dan akses air minum yang tidak memadai (Setyorini et al., 2022). Berdasarkan rekapitulasi data, terdapat 1.419 keluarga berisiko *stunting* di tingkat kecamatan. Dari jumlah tersebut, 9 keluarga tidak memiliki sumber air minum yang layak, 543 keluarga tidak memiliki jamban yang memadai, dan 867 keluarga termasuk dalam kategori 4 terlalu, yakni hamil pada usia terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, serta tidak menjadi peserta program KB modern.

Upaya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Ngusikan dalam mencegah terjadinya kasus *stunting* melalui inovasi program yaitu Program cegah *stunting* sejak dini. Program ini menyoar keluarga berisiko *stunting* yang ada di Kecamatan Ngusikan dengan mengoptimalkan pencegahan *stunting* melalui kegiatan preventif seperti pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Kegiatan pendampingan keluarga yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya program cegah *stunting* sejak dini melalui strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, lokasi ini dipilih karena menjadi lokasi pelaksanaan program cegah *stunting* sejak dini. Menurut Moleong (2021:28), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian. Batasan fokus penelitian ini dikaji dengan menggunakan variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Variabel-variabel tersebut antara lain tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta faktor eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, dan politik).

Sumber data primer merupakan informan terpilih yaitu tim percepatan penurunan *stunting*, tim pendamping keluarga dan keluarga berisiko *stunting*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman (Hardani, 2020,174) yaitu teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan**

#### 1. Tujuan kebijakan

Hasil penelitian implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Program Cegah *Stunting* Sejak Dini di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kecamatan Ngusikan, Sekretaris TPPS Kecamatan Ngusikan, dua orang anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan dua orang keluarga berisiko *stunting*.

D. Van Meter dan C. Van Horn menyatakan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Kegagalan juga sering terjadi apabila tujuannya tidak jelas (Agustino, 2022). Tujuan program cegah *stunting* sejak dini yaitu penurunan angka *stunting* di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh informan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Ngusikan, bahwa tujuan dari program tertuang jelas pada peraturan bupati untuk penurunan *stunting* dengan prevalensi *stunting* turun menjadi 14% tahun 2024. Prevalensi *stunting* di Kecamatan Ngusikan rendah, namun angka keluarga berisiko *stunting* cukup tinggi. Sehingga diperlukan program preventif guna mencegah kasus anak *stunting*. Oleh karena itu TPPS Kecamatan Ngusikan perlu mencanangkan program cegah *stunting* sejak dini agar prevalensi *stunting* tidak meningkat.

Para implementor melaksanakan tugas berdasarkan isi mandat dari Peraturan bupati nomor 4 tahun 2022. Tujuan program cegah *stunting* sejak dini

untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% dapat terlaksana dengan baik. Banyaknya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah *stunting* menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi program ini. Program ini mengintegrasikan segala upaya dalam penurunan *stunting* termasuk pemenuhan gizi anak usia dini, pemantauan status gizi anak dan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak usia dini.

## 2. Sumber daya

D. Van Meter dan C. Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial/anggaran, serta sumber daya waktu (Shauma, 2022). Dalam implementasi kebijakan program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan, informan menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia sudah sesuai dan kompeten sesuai dengan masing-masing bidangnya. Adapun sumber daya manusia sebagai implementor program ini adalah professional yang tentunya sudah ahli dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksana tersebut terdiri dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam penanganan spesifik terkait *stunting* serta penyuluh keluarga berencana yang kompeten dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan *stunting*. Latar belakang profesi dan keahlian sangat berpengaruh dalam keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini.

Pelaksana di tingkat desa merupakan tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan desa, tim penggerak PKK serta kader KB. Anggota TPK berdomisili di wilayah itu sendiri sehingga dapat menentukan sasaran keluarga *stunting* dengan tepat. Tim pendamping keluarga selaku pelaksana program di tingkat desa yang berasal dari masyarakat menyatakan bahwa dengan keterlibatan pada program cegah *stunting* sejak dini selama tiga tahun terakhir, mereka telah mendapatkan banyak ilmu melalui pelatihan dan pembinaan untuk

meningkatkan kompetensi. Penentuan sasaran yang tepat serta kompetensi dari tim pendamping keluarga yang memadai dapat berpengaruh dalam mendukung program cegah *stunting* sejak dini.

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya finansial atau anggaran serta waktu. Hal ini dikarenakan jika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia namun dana dari anggaran tidak mencukupi, maka akan muncul masalah dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan (Salsabilla, 2022). Terkait sumberdaya finansial/Anggaran untuk implementasi program cegah *stunting* sejak dini ini telah tersedia. Anggaran berasal dari pemerintah desa, pemerintah daerah/kabupaten maupun pemerintah pusat.

Adapun anggaran yang ada guna mendukung program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan bersumber dari beberapa lintas sektor terkait di Kecamatan Ngusikan seperti dari Puskesmas, KUA, penyuluh KB Kecamatan Ngusikan, Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping Program Keluarga Harapan, Pemerintah desa, serta Pemerintah kabupaten. Anggaran guna mendukung program cegah *stunting* sejak dini dari puskesmas antara lain pemberian suplemen tablet tambah darah (TTD) pemeriksaan kehamilan, PMT untuk ibu hamil berisiko, konseling kepada ibu hamil, suplemen vitamin A untuk ibu nifas, serta promosi dan edukasi pemberian ASI eksklusif.

Adapun anggaran dari lintas sektor Penyuluh Pertanian Lapangan yaitu pengembangan lumbung pangan masyarakat serta pengembangan pekarangan Pangan Lestari. Dukungan dari penyuluh Keluarga Berencana untuk program cegah *stunting* sejak dini antara lain pelayanan KB pada pasangan usia subur, pelatihan kader Bina Keluarga Balita, pembinaan calon peserta KB pasca salin, pembinaan kepada kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja serta optimalisasi dapur sehat atasi *stunting* (*Dashat*).

Dukungan anggaran melalui program keluarga harapan antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT) serta pemberian bantuan tunai

bersyarat program keluarga harapan. Pemerintah Kecamatan melalui Camat sebagai pemimpin di wilayah tingkat kecamatan memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelenggaraan agenda lokakarya Mini lintas sektor terkait percepatan penurunan *stunting* dan rembug *stunting* di Kecamatan Ngusikan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu penyelenggaraan optimalisasi Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, pengadaan alat-alat pengukuran tumbuh kembang anak terbaru sesuai dengan kebutuhan saat ini, peningkatan cakupan pelayanan akses air minum yang layak, serta pencapaian desa (*odf*) *Open defecation free* serta peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Pemerintah kabupaten menyalurkan anggaran yang bertujuan untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pelaksana seperti lokakarya mini dan kegiatan rembug *stunting* serta pemberian makanan tambahan dan susu tinggi kalori kepada anak dengan kasus *stunting*. Selain itu terdapat anggaran untuk tim pendamping keluarga sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa berupa uang transport untuk pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*.

### 3. Karakteristik agen pelaksana

Kinerja implementor program sangat dipengaruhi oleh kecocokan karakteristik agen pelaksana. Selain itu, cakupan luas area penerapan kebijakan juga harus diperhatikan dalam memilih agen pelaksana dimana semakin besar cakupan wilayah, semakin banyak agen yang perlu dilibatkan. Informan menyatakan pembagian wewenang yang ada menganut pada peraturan bupati serta SK yang disusun oleh Camat. Pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing lintas sektor yang terlibat dalam program cegah *stunting* sejak dini.

Agen pelaksana harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan. Kualitas pelatihan dan pendidikan yang diterima agen pelaksana akan mempengaruhi

keberhasilan dalam menerapkan program. Kompetensi yang sesuai dapat mendukung proses implementasi dan meningkatkan keberhasilan program. Struktur organisasi dan mekanisme koordinasi antara para pelaksana juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur yang jelas telah tercantum pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh camat selaku pimpinan wilayah, hal ini membantu memastikan bahwa wewenang dan tanggung jawab telah terdistribusi dengan efektif.

Perlu mempertimbangkan cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan saat menentukan agen pelaksana di mana semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan (Kusnadi, 2020). Dalam hal ini pembagian pelaksana khususnya di tingkat desa disesuaikan dengan jumlah sasaran keluarga berisiko *stunting* yang ada di desa tersebut. Implementasi program ini berupaya merubah perilaku keluarga berisiko *stunting* terkait pengasuhan anak usia dini oleh karena itu jumlah pelaksana disesuaikan dengan jumlah keluarga berisiko *stunting* yang ada di wilayah tersebut, semakin banyak jumlah keluarga berisiko *stunting* maka jumlah personil pelaksana juga lebih banyak.

#### 4. Disposisi pelaksana

Sikap agen pelaksana, baik penerimaan maupun penolakan, memiliki dampak besar terhadap sukses atau gagalnya pelaksanaan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, indikator sikap pelaksana terbagi menjadi dua kategori, yaitu tanggapan/respons pelaksana dan pemahaman pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai tanggapan pelaksana program, diketahui bahwa pelaksana program cegah *stunting* sejak dini telah memberikan tanggapan positif tanpa adanya penolakan.

Van horn & Van Meter menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan (Alamsyah, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait tanggapan implementor dalam mengimplementasikan program cegah *stunting* sejak dini sudah memberikan respons yang positif dan tanpa adanya penolakan. Pelaksana merespon positif terhadap kebijakan ini



dan melaksanakan instruksi terkait program cegah *stunting* sejak dini dengan patuh dan penuh rasa tanggung jawab.

Terkait dengan pemahaman yang perlu dimiliki oleh para pelaksana hasil penelitian ini menunjukkan para pelaksana sudah dapat memahami dengan baik terkait program cegah *stunting* sejak dini. Pelaksana program ini merupakan tenaga ahli di bidangnya masing-masing, adapun pelaksana di tingkat desa telah mendapatkan pelatihan dan orientasi terkait program secara berkala. Pemahaman yang baik oleh para pelaksana merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan.

#### 5. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan sarana yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil (Kusnadi & Baihaqi, 2020). Informan menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar para implementor sudah baik. Kegiatan lokakarya mini serta rembug *stunting* sebagai sarana komunikasi antar organisasi yang terlibat pada program cegah *stunting* sejak dini dilaksanakan secara rutin. Forum-forum tersebut dapat menjadi wadah jika ada informasi terbaru yang perlu disampaikan.

Merujuk pada surat keputusan camat ngusikan terkait tim percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Ngusikan, tercatat beberapa organisasi yang terlibat pada program ini antara lain pemerintah kecamatan, koramil, polsek, puskesmas, penyuluh KB, Kantor Urusan Agama, Ikatan Bidan Indonesia, tim penggerak PKK, serta petugas data statistik tingkat kecamatan. Seluruh organisasi bersinergi dalam upaya mewujudkan keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa berbagai aspek yang mempengaruhi *stunting* mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan pola asuh, hingga akses ke layanan sanitasi lingkungan dapat diatasi secara terpadu untuk mendukung keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Jelas sekali bahwa keadaan lingkungan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mempercepat penurunan *stunting*. dalam Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Agustino, 2022:144). Dalam konteks lingkungan sosial, keterbatasan pengetahuan tentang pola asuh yang baik dan informasi mengenai asupan makanan bergizi juga sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan bahwa masih banyak orang tua yang menyerahkan pengasuhan anak ke neneknya karena ibu menikah di usia muda yang mengakibatkan pengetahuan mengenai pola asuh yang baik dan asupan bergizi untuk anak sangat minim. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari ibu anak dengan kasus *stunting*, di Kecamatan Ngusikan tingkat pendidikan didominasi oleh ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu setara dengan SMP.

Informan mengemukakan bahwa terkadang ada keluarga berisiko *stunting* yang bisa menerima namun ada juga keluarga yang tidak terima anaknya dinyatakan *stunting*. Hal ini dipengaruhi dengan stigma masyarakat jika memiliki anak *stunting* adalah suatu hal yang memalukan sehingga seringkali keluarga dengan anak *stunting* mendapatkan cibiran dari masyarakat di sekitarnya. Hal ini menyebabkan lingkungan sosial belum mendukung keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya hubungan antara risiko *stunting* dan status ekonomi orang tua. Pada beberapa kasus *stunting* yang terjadi di Kecamatan Ngusikan terlihat bahwa balita yang mengalami *stunting* sering ditemukan di keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan balita yang berasal dari keluarga yang rentan terhadap masalah pangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga sebesar 44,8% keluarga dengan kasus anak *stunting* merupakan keluarga dengan kategori pra sejahtera.

Tingkat kesejahteraan dan mata pencaharian memiliki hubungan yang erat. Tingkat kesejahteraan seseorang atau suatu kelompok seringkali

tercermin dari jenis dan stabilitas mata pencaharian yang dimiliki. Hasil penelitian ini menemukan bahwa anak dengan kasus *stunting* di Kecamatan Ngusikan didominasi oleh anak dengan orang tua yang bekerja sebagai buruh tidak tetap. Hal ini menyebabkan lingkungan sosial belum mendukung keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan.

Kebijakan publik tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik, atau dengan kata lain, kebijakan publik dalam konteks ini perlu dipertimbangkan dari sudut pandang lingkungan politik. Informan mengungkapkan bahwa lingkungan politik tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan penurunan *stunting* ini. Pada bulan September tahun 2023 terjadi pergantian pimpinan dimana jabatan Bupati Jombang diganti dengan PJ Bupati Jombang saat ini. Implementasi kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 dengan dukungan pimpinan yang baru sehingga program cegah *stunting* sejak dini dapat terlaksana dengan baik.

Prinsip reformasi birokrasi dalam hal partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan barang dan layanan publik dengan mengembangkan pola kemitraan dan kolaborasi, bukan hanya sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan, kepercayaan masyarakat harus diperkuat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi harus diperluas. (Susilo, 2022). Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi ini sudah sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi di mana masyarakat umum dilibatkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Adapun Keterlibatan masyarakat antara lain sebagian dari masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pelaksana yaitu sebagai tim pendamping keluarga. Selain itu organisasi masyarakat juga turut serta dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Ngusikan, seperti pembagian telur kepada keluarga berisiko *stunting* yang dilakukan oleh organisasi perempuan.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati No 04 Tahun 2022 Program Cegah *Stunting* Sejak Dini antara lain :

1. Kinerja pelaksana program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan yang baik. Pelaksana program memiliki tanggung jawab langsung dalam menerapkan kegiatan-kegiatan program cegah *stunting* sejak dini, seperti penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan, distribusi suplemen gizi, dan pendampingan keluarga. Koordinasi dan sinergi yang baik antar lintas sektor merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini karena dengan melibatkan berbagai sektor, program cegah *stunting* menjadi lebih terlihat dan lebih didukung oleh masyarakat secara luas. Ini karena program tidak hanya terlihat sebagai tanggung jawab satu sektor, tetapi sebagai upaya bersama untuk mencegah permasalahan *stunting*.
2. Adanya anggaran dari pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah daerah maupun Pemerintah desa untuk mendukung program mencegah *stunting* sejak dini. Anggaran memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan program cegah *stunting* sejak dini. Anggaran yang cukup dari pemerintah memungkinkan untuk alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program cegah *stunting* sejak dini. Kebijakan pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas dan regulasi yang mengatur pelaksanaan program, kebijakan pemerintah seringkali diikuti dengan alokasi anggaran yang khusus untuk mendukung program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan.
3. Ketelatenan keluarga dalam memberikan nutrisi yang seimbang dan berkualitas kepada anak dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Kemauan keluarga untuk memastikan anak mendapatkan makanan bergizi secara teratur dapat membantu menghindari masalah *stunting*.

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pasti ada yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh faktor penghambat keberhasilan program faktor penghambat

keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Program Cegah *Stunting* Sejak Dini antara lain:

1. Terbatasnya jumlah bantuan dari pemerintah dalam upaya mencegah *stunting*. Keterbatasan bantuan dapat menyebabkan tidak maksimalnya cakupan program cegah *stunting*. Beberapa wilayah atau kelompok masyarakat mungkin tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan gizi, suplemen gizi, atau informasi tentang pentingnya mencegah *stunting*.
2. Faktor dari keluarga itu sendiri yaitu minimnya kesadaran atau kelalaian orang tua dalam pengasuhan anak sehingga terjadi kasus *stunting*. Orang tua yang kurang sadar akan pentingnya perawatan anak mungkin tidak memahami praktik-praktik penting seperti memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, memberikan makanan pendamping ASI yang tepat waktu, atau memberikan stimulasi dan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Orang tua yang kurang sadar akan pentingnya pola makan yang seimbang mungkin cenderung memberikan makanan yang kurang bergizi kepada anak-anak mereka. Kurangnya kesadaran akan nutrisi yang tepat dapat menyebabkan defisiensi zat gizi penting yang memicu *stunting*.
3. Kegiatan yang hanya dilaksanakan satu periode saja tidak berkelanjutan. *Stunting* bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan satu kali kegiatan atau intervensi. Hal ini memerlukan perubahan perilaku dan praktik gizi yang berkelanjutan dari orang tua dan masyarakat. Kegiatan yang tidak berkelanjutan tidak dapat menciptakan perubahan yang diperlukan dalam jangka panjang. Untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mencegah *stunting* sejak dini, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan terus-menerus, dengan kegiatan yang dilakukan secara berulang dan terintegrasi dalam jangka waktu yang panjang.

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi asupan gizi untuk anak berisiko *stunting* merupakan faktor penghambat dalam program cegah *stunting* sejak dini karena dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, pilihan makanan yang tidak sehat, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan suplemen gizi, serta kurangnya pendidikan gizi yang

penting. Oleh karena itu, program cegah *stunting* perlu memperhatikan dan mengatasi faktor ekonomi ini untuk mencapai hasil yang optimal dalam mencegah *stunting* pada anak-anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut didasarkan pada tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Sumber daya manusia pada implementasi kebijakan ini sudah terpenuhi dengan baik, sumber daya finansial/anggaran pada implementasi kebijakan ini tersedia cukup baik namun sumber daya waktu pada implementasi kebijakan ini masih belum optimal. Karakteristik organisasi pelaksana sudah baik. Disposisi pelaksana menunjukkan respon pelaksana terkait implementasi kebijakan ini baik sekali. Komunikasi antar organisasi yang terjadi dalam rangka implementasi kebijakan ini sudah baik. Faktor lingkungan sosial masih belum mendukung keberhasilan program ini, lingkungan ekonomi belum mendukung keberhasilan program ini, serta lingkungan politik yang turut serta mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati No 4 tahun 2022 program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan antara lain kinerja pelaksana program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan dipengaruhi oleh koordinasi dan sinergi yang baik antar lintas sektor dalam upaya tersebut, adanya kebijakan dan anggaran dari pemerintah untuk mendukung program cegah *stunting* sejak dini, serta ketelatenan keluarga dan kemauan keluarga berisiko *stunting* untuk keluar dari masalah anak *stunting*.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati No 4 tahun 2022 program cegah *stunting* sejak dini di Kecamatan Ngusikan antara lain terbatasnya jumlah bantuan pemerintah dalam upaya mencegah *stunting*, faktor minimnya kesadaran atau kelalaian orang tua dalam pengasuhan anak sehingga terjadi kasus *stunting*, kegiatan yang hanya dilaksanakan satu periode saja tidak berkelanjutan, serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi asupan gizi untuk anak berisiko *stunting*.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan untuk mengatasi kendala implementasi dan faktor penghambat implementasi adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya program bantuan langsung kepada keluarga berisiko *stunting* yang membutuhkan dalam bentuk program bantuan makanan, suplemen gizi, atau pendidikan gizi.
2. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kesadaran tentang pentingnya memenuhi kebutuhan gizi keluarga khususnya anak berisiko *stunting*.
3. Perlu dilakukan identifikasi intervensi yang paling efektif untuk menurunkan *stunting* dan memfokuskan sumber daya pada intervensi-intervensi tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan anggaran dan waktu yang terbatas.

Perlu adanya pembentukan kelompok-kelompok dukungan sosial di tingkat komunitas untuk saling berbagi sumber daya dan informasi tentang cara memenuhi kebutuhan gizi dengan anggaran terbatas.

## REFERENSI

- Agustino, L. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, K., Prastiwi, E. N., & Salamah, U. 2021. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 107-121.
- Archda, R., & Tumangger, J. (2019). *Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia*.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Khosiah, K., & Muhardini, S. (2019). Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) unsur perangkat desa dan kader pembangunan manusia se-Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok (Stunting dan konvergensi pencegahan stunting). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Di Kabupaten Subang. *The World Of Public Administration Journal*.
- Moleong, Lexy J.. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, R., Bagata, D. T. R., Raodah, R., Almah, U., Azis, M. I., Zadi, B. S., Noormansyah, D. A., Khodijah, S., Al Jauhariy, M. R., & Risyki, M. F. (2020).

- Sosialisasi Pencegahan Stunting Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2), 79–84.
- Setyorini, C., Febriani, A., & Pratiwi, I. A. (2022). Implementasi Metode Home Visit dalam Pendampingan Ibu Hamil dan Anak Baduta untuk Pencegahan Stunting. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(2), 275–282.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.